

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2013

BAPPEDA KOTA BALIKPAPAN



BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KOTA BALIKPAPAN

KATA PENGANTAR

Berakhirnya pelaksanaan Program dan Kegiatan tahun anggaran 2013 ditindak lanjuti dengan penyusunan pelaporan dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan. Sesuai dengan ketentuan bahwa pelaporan dan evaluasi atas pelaksanaan Program dan Kegiatan disampaikan berdasarkan kinerja atau prestasi kerja masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sebagaimana amanat Instruksi Presiden RI Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor : 239/IX/6/8/2003 tanggal 25 Maret 2003 tentang Pedoman Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Dengan tersusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun Anggaran 2013 diharapkan dapat memacu pelaksanaan Good Corporate Governance dan Clear Government yang melibatkan stakeholders sehingga ke depan akan tercipta sasaran serta hasil kerja yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan amanat Visi dan Misi Pemerintah Kota Balikpapan Tahun 2011-2016.

LAKIP Bappeda Tahun 2013 ini secara garis besar berisi informasi mengenai pelaksanaan rencana kerja beserta pencapaian target dari sasaran strategis tahun anggaran 2013, termasuk pengukuran terhadap pencapaian indikator kinerja.

Sangat disadari bahwa penyusunan LAKIP ini masih banyak kelemahan dan kekurangannya, namun demikian laporan ini dapat dijadikan tolok ukur terhadap peningkatan akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah khususnya Bappeda Kota Balikpapan sebagai wujud pertanggungjawabannya kepada Walikota Balikpapan dan Masyarakat.

Balikpapan, Februari 2014

KEPALA BAPPEDA KOTA BALIKPAPAN,


The stamp is circular with a blue border. Inside the border, the text reads 'Pemerintah Kota Balikpapan' at the top, 'BAPPEDA' in the middle, and 'PERENCANAAN PEMBANGUNAN' at the bottom. A signature is written across the center of the stamp.
SURYANTO
Pembina Utama Muda
NIP. 19601101 198501 1 003

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	1
DAFTAR ISI	2
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	3
B. Tugas Pokok dan Fungsi	3
C. Aspek Strategis	4
D. Struktur Organisasi.....	7
E. Sistematika Penulisan.....	8
BAB II PERENCANAAN STRATEGI DAN PENETAPAN KERJA	
A. Rencana Strategis	9
1. Visi dan Misi	9
2. Tujuan dan Sasaran	12
3. Strategi dan Kebijakan	16
4. Rencana Kerja Tahunan Tahun 2013	18
B. Indikator Kinerja Utama	20
C. Penetapan Kinerja Tahun 2013.....	21
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
A. Pengungkapan Akuntabilitas Kinerja	25
B. Pengungkapan Akuntabilitas Keuangan	30
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan	37
B. Saran	38
LAMPIRAN :	
1. SK Indikator Kinerja Utama	
2. Penetapan Kinerja Tahun 2013	
3. Pengukuran Kinerja Tahun 2013	

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Dalam rangka terwujudnya *good governance*, diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggung jawaban yang tepat, jelas, terukur dan syah sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Setiap unsur pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan wajib untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya. Dalam hal ini, setiap instansi pemerintah secara periodik wajib mengkomunikasikan pencapaian tujuan dan sasaran strategis organisasi kepada para stakeholder, yang dituangkan melalui Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

Bappeda Kota Balikpapan sebagai instansi pemerintah Kota Balikpapan berkomitmen untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya pelaksanaan kebijakan dan program yang diemban sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Balikpapan 2011-2016 dan Rencana Strategis Bappeda Kota Balikpapan 2011-2016 dalam sebuah Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Bappeda Kota Balikpapan Tahun 2013.

B. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Balikpapan dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 2 Tahun 2001 dan merupakan unsur staf dalam Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah yang bertanggungjawab kepada Walikota. Berdasarkan Peraturan Daerah tersebut, Tugas Pokok Bappeda Kota Balikpapan adalah membantu Kepala Daerah dalam menentukan kebijaksanaan dibidang Perencanaan Pembangunan Daerah serta Penilaian Atas Pelaksanaannya.

Berdasarkan pada Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 18 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dan Lembaga Teknis Daerah, Bappeda Kota

Balikpapan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang perencanaan pembangunan daerah dan penelitian.

Untuk melaksanakan tugas tersebut di atas, fungsi Bappeda Kota Balikpapan adalah sebagai berikut :

- Perumusan kebijakan teknis perencanaan;
- Pengoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan;
- Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perencanaan pembangunan daerah dan penelitian;
- Pelaksanaan, pengoordinasian dan pembinaan penelitian;
- Penyelenggaraan urusan kesekretariatan;
- Pembinaan kelompok jabatan fungsional;
- Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugasnya.

C. ASPEK STRATEGIS

Bappeda sebagai Lembaga Teknis Perencanaan Pembangunan Daerah, yang melaksanakan tugas pokok dan fungsinya berdasarkan pada Peraturan Kota Balikpapan Nomor 18 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dan Lembaga Teknis Daerah. Tugas pokok dan fungsi Bappeda adalah melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang perencanaan pembangunan daerah dan penelitian. Kondisi penyelenggaraan pelayanan Bappeda Kota Balikpapan dapat ditinjau dari beberapa aspek, antara lain :

1. Kelembagaan

Kelembagaan Bappeda Kota Balikpapan mendasarkan pada Peraturan Kota Balikpapan Nomor 18 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dan Lembaga Teknis Daerah.

2. Mekanisme Perencanaan

Seiring dengan diberlakukannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, mekanisme perencanaan pembangunan daerah dituntut untuk semakin mengedepankan pendekatan perencanaan pembangunan partisipatif (*participatory planning*).

Sistem Perencanaan Pembangunan mencakup lima pendekatan dalam seluruh rangkaian perencanaan, yaitu : politik; teknokratik; partisipatif; atas-bawah (*top-down*); dan bawah atas (*bottom-up*). Pendekatan politik memandang bahwa pemilihan Kepala Daerah adalah proses penyusunan rencana, karena rakyat pemilih menentukan pilihannya berdasarkan program-program pembangunan yang ditawarkan masing-masing calon Kepada Daerah. Oleh karena itu, rencana pembangunan adalah penjabaran dari agenda-agenda pembangunan yang ditawarkan Kepala Daerah pada saat kampanye kedalam rencana pembangunan jangka menengah. Perencanaan dengan pendekatan teknokratik dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah oleh lembaga atau satuan kerja yang secara fungsional bertugas dalam perencanaan pembangunan daerah. Perencanaan dengan pendekatan partisipatif dilaksanakan dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) terhadap pembangunan. Pelibatan mereka adalah untuk mendapatkan aspirasi dan menciptakan rasa memiliki. Sedangkan pendekatan atas-bawah dan bawah-atas dalam perencanaan dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan. Rencana hasil proses atas-bawah dan bawah atas diselenggarakan melalui musyawarah yang dilaksanakan baik di tingkat kota, kecamatan, dan kelurahan.

3. Hasil Kinerja

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Bappeda Kota Balikpapan telah melaksanakan kegiatan utama dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah antara lain:

- a. Dokumen Perencanaan Jangka Panjang: Penyusunan RPJPD 2005 – 2025 Kota Balikpapan, yang telah ditetapkan dalam bentuk Perda Kota Balikpapan Nomor 1 Tahun 2013.
- b. Dokumen Perencanaan Jangka Menengah: Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), yang ditetapkan dengan Perda Nomor 08 Tahun 2011.
- c. Dokumen Perencanaan Jangka Pendek: Perencanaan umum, Forum SKPD, Penyusunan RKPD Kota Balikpapan, Penetapan RKPD, Koordinasi penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan.
- d. Dokumen Perencanaan Teknis lainnya : penyusunan Revisi RTRW Kota Balikpapan Tahun 2012-2032, Penyusunan Sistem Moda Transportasi Kota Balikpapan, Review Master Plan Pemukiman Atas air, Studi ALKI II, Studi Pengembangan dan Pemanfaatan Sumber Daya Kelautan, Penyusunan Renstra Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau Pulau Kecil, Studi Kelayakan Rencana Pembangunan Pasar dan Terminal, Pengendalian Inflasi, Penyusunan Master Plan Pengelolaan Persampahan dan Kebersihan Kota, Pemetaan Kawasan Lokasi Investasi di Kota Balikpapan, Penyusunan Renstra Penanggulangan Kemiskinan Kota Balikpapan Tahun 2011-2016, Studi Kelayakan Pembangunan dan lokasi Gedung Diklat, Studi Kelayakan Lokasi Pembangunan SMK di Balikpapan Barat.
- e. Melaksanakan rangkaian kegiatan dalam rangka perencanaan pembangunan tahunan mulai dari musyawarah perencanaan pembangunan tingkat kecamatan dan kota maupun forum Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD); pelaksanaan penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, bersama-sama dengan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, Dispenda dan Bagian Pembangunan;

4. Sumber Daya Manusia :

Dalam melaksanakan peran, tugas pokok dan fungsinya, Bappeda masih mengalami hambatan terutama pada sumber daya manusia dan perangkat penunjangnya. Sumber daya manusia di Bappeda masih terbatas jumlahnya termasuk kapasitas maupun kapabilitasnya. Dengan perkembangan sistem perencanaan pembangunan, maka pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia perencana yang tanggap dengan melaksanakan pengiriman staf untuk

mengikuti pendidikan dan pelatihan masih belum mencukupi. Perangkat keras untuk mendukung perencanaan pembangunan masih belum memenuhi kebutuhan, baik jumlah, teknologi yang dipakai maupun jenisnya.

Tantangan yang perlu diantisipasi oleh Bappeda Kota Balikpapan dalam melaksanakan perencanaan pembangunan daerah adalah sebagai berikut:

1. Munculnya berbagai kebijakan nasional yang berdampak pada perubahan kebijakan daerah secara mendadak sehingga menyebabkan *inkonsistensi* perencanaan pembangunan di daerah;
2. Perubahan paradigma perencanaan pembangunan yang menuntut perencana sebagai fasilitator dan mediator dalam menata inisiatif masyarakat;
3. Belum optimalnya kegiatan evaluasi pelaksanaan pembangunan dalam memberikan kontribusi terhadap penyusunan kegiatan perencanaan selanjutnya.

Peluang dalam pengembangan pelayanan SKPD dalam rangka perencanaan pembangunan daerah antara lain :

1. Adanya Peraturan Daerah Kota Balikpapan tentang RTRW Kota Balikpapan 2012-2032;
2. Adanya SDM Aparatur perencana yang sebagian besar berpendidikan tinggi sehingga mempunyai kemampuan dan dedikasi dalam menyusun dan merumuskan kebijakan perencanaan pembangunan daerah;
3. Adanya kepedulian dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan Kota.

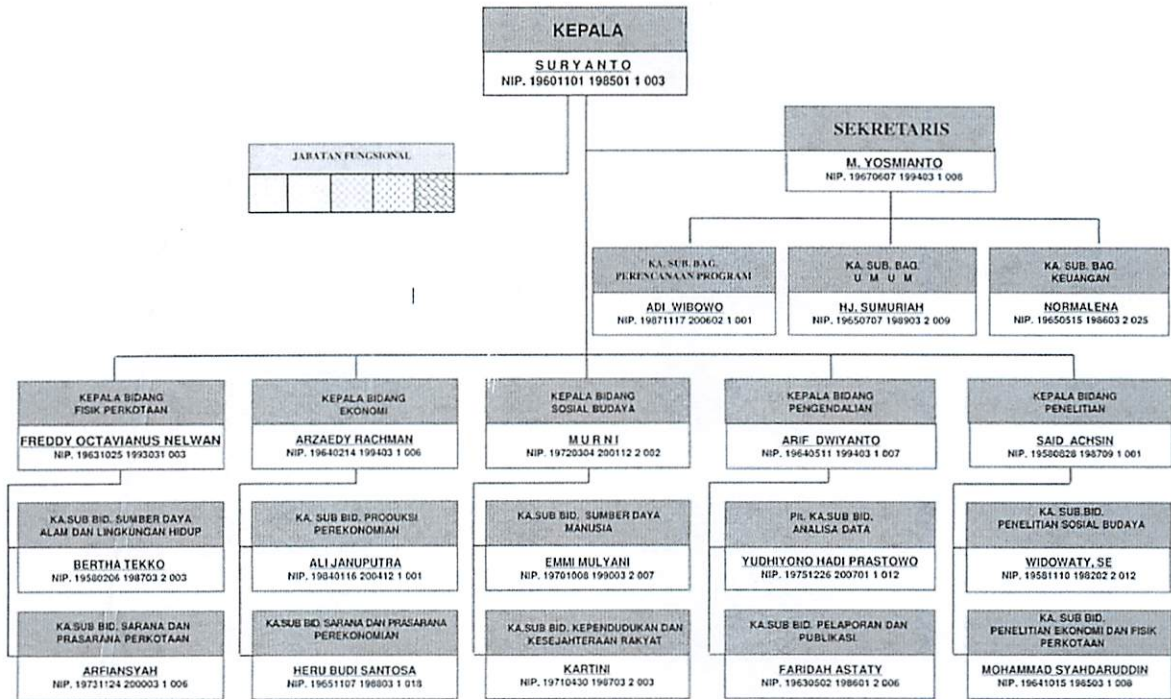
D. STRUKTUR ORGANISASI

Berdasarkan pada Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 18 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dan Lembaga Teknis Daerah, Bappeda Kota Balikpapan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang perencanaan pembangunan daerah dan penelitian.

Bappeda Kota Balikpapan dipimpin oleh Kepala Bappeda Kota Balikpapan yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dibantu oleh 1

Sekretaris dan 5 Kepala Bidang. Struktur organisasi Bappeda Kota Balikpapan adalah sebagai berikut :

**STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KOTA BALIKPAPAN**



E. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Bappeda Kota Balikpapan Tahun 2013 adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab tersebut berisi latar belakang penyusunan LAKIP Bappeda Tahun 2013 dan profil Bappeda Kota Balikpapan yang meliputi tugas pokok dan fungsi, aspek strategis dan struktur organisasi.

BAB II PERENCANAAN STRATEGI DAN PENETAPAN KINERJA

Bab ini berisi gambaran umum uraian Rencana Strategis yang menjabarkan visi, misi dan tujuan serta sasaran-sasaran yang akan dicapai sesuai dengan RPJMD Kota Balikpapan 2011-2016 dan Renstra Bappeda Kota Balikpapan 2011-2016.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Bab ini berisi uraian evaluasi capaian kinerja; evaluasi akuntabilitas keuangan; analisis kinerja dan keuangan yang menggambarkan pelaksanaan kegiatan tahun 2013 terkait dengan tugas pokok dan tugas-tugas strategis lainnya.

BAB IV PENUTUP

Bab ini berisi ringkasan dari tinjauan pelaksanaan kegiatan dan kinerja yang dirangkum dalam kesimpulan terhadap akuntabilitas kinerja serta saran tindak lanjutnya.

BAB II

PERENCANAAN STRATEGI DAN PENETAPAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

1. VISI DAN MISI

Dalam rangka mengantisipasi tantangan dan dinamika masyarakat yang semakin berkembang sesuai dengan tuntutan perubahan, maka Bappeda Kota Balikpapan perlu secara berkesinambungan mengembangkan kemampuan, kreatifitas, peluang dan inovasi, sehingga dapat tetap mengikuti kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka penunjang pelaksanaan tugas dibidang Perencanaan Pembangunan Daerah.

Meningkatnya kompetisi dan semakin menguatnya tuntutan masyarakat mengenai akuntabilitas, transparansi, keterbukaan, kepastian hukum, partisipasi dan akomodatif terhadap berbagai bentuk-bentuk pelayanan publik, mendorong Bappeda Kota Balikpapan mempersiapkan diri agar tetap eksis dan unggul. Untuk mewujudkan cita-cita itu Bappeda Kota Balikpapan senantiasa mengupayakan berbagai perubahan yang menuju kearah perbaikan kinerja, meningkatkan kemampuan sumber daya aparatur dan menetapkan standar-standar kerja guna menunjang penyelesaian tugas-tugas perencanaan yang semakin kompleks.

Perubahan tersebut dilakukan secara bertahap, terencana, konsisten dan berkelanjutan, dengan harapan agar dapat terwujudnya suatu peningkatan akuntabilitas kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil atau manfaat sebagai implementasi dari pada pelayanan publik.

Oleh sebab itu guna mewujudkan cita-cita tersebut, maka Bappeda Kota Balikpapan telah menetapkan Visi sebagai instrumen untuk menentukan kearah mana pencapaian hasil itu akan dituju. Visi merupakan cara pandang jauh ke depan dan sangat menentukan kemana Bappeda Kota Balikpapan akan diarahkan dan apa yang akan dicapai. Untuk itu Bappeda Kota Balikpapan telah menetapkan visi sebagai pedoman yang menentukan arah pencapaian tujuan yaitu ***"Terwujudnya Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Kota yang Berkualitas dalam rangka mewujudkan Balikpapan Nyaman Dihuni"***

Visi Bappeda Kota Balikpapan selaras dengan Visi jangka menengah Kota Balikpapan 2011-2016 yaitu : *"Mewujudkan Kota Balikpapan Nyaman Dihuni Menuju Madinatul Iman"* dan visi jangka panjang Kota Balikpapan 2005-2025, yaitu untuk *"Mewujudkan Kota Balikpapan sebagai Kota 5 Dimensi : Jasa, Industri, Perdagangan, Pariwisata, Pendidikan dan Budaya dalam Bingkai Madinatul Iman"*. Dalam keterkaitan dengan Visi Kota, maka segenap jajaran Satuan Kerja dilingkungan Pemerintah Kota Balikpapan memerlukan perencanaan pembangunan yang dapat diandalkan sebagai dasar dari arah kebijakan pelaksanaan pembangunan. Komitmen tersebut harus dimiliki dan disediakan oleh Bappeda Kota Balikpapan kepada para stakeholders sesuai tugas pokok dan fungsi yang menjadi tanggungjawabnya yaitu Perencanaan Pembangunan Kota Balikpapan.

Guna melaksanakan mandat tersebut, secara profesional, dituntut mengoptimalkan segala potensi yang dimiliki dengan harapan hasil akhir dari suatu kegiatan membawa pengaruh terhadap perubahan-perubahan bidang perencanaan, sehingga pimpinan satuan kerja beserta seluruh jajarannya senantiasa mengembangkan diri sesuai dengan tuntutan dan dinamika masyarakat. Hal ini akan menjadikan Bappeda Kota Balikpapan sebagai suatu organisasi diakui keberadaannya.

Misi merupakan cara untuk mencapai Visi, dan pernyataan yang menetapkan tujuan serta sasaran yang ingin dicapai. Dalam misi suatu organisasi menjelaskan mengapa organisasi itu ada dan untuk apa kegiatan itu dilakukan, serta bagaimana melaksanakannya.

Berdasarkan hal diatas dan untuk pencapaian Visi tersebut Bappeda Kota Balikpapan mempunyai Misi yaitu :

1. Meningkatkan kualitas Penyusunan Perencanaan Pembangunan Kota;
2. Meningkatkan koordinasi, integritas, sinkronisasi dan simplifikasi perencanaan pembangunan;
3. Meningkatkan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi pembangunan;
4. Meningkatkan kualitas penelitian dan pengembangan pembangunan daerah.

Untuk mewujudkan Visi dan Misi Bappeda Kota Balikpapan, maka hal pertama yang dilakukan adalah menyelenggarakan Manajemen Perencanaan Pembangunan Daerah. Dengan misi pertama tersebut maka akan tersedia dokumen perencanaan yang baik dalam pelaksanaan pembangunan Kota Balikpapan yang dapat digunakan oleh Pemerintah Kota Balikpapan beserta jajarannya, serta masyarakat luas termasuk para pelaku usaha diberbagai bidang. Selanjutnya melalui misi kedua, semua hasil kerja Bappeda akan mampu diolah sehingga dapat diakses oleh berbagai lapisan masyarakat dengan mudah dan murah.

Agar semua itu dapat menjadi suatu hasil yang prima, maka Sumber Daya Manusia yang merupakan bagian terpenting, harus selalu ditingkatkan kemampuannya dalam Bidang Perencanaan. Walaupun telah cukup memiliki Sumber Daya Manusia yang memadai, Bappeda merasakan kebutuhan untuk selalu meningkatkan kemampuan dalam bidang perencanaan agar selalu berada pada posisi terdepan dalam lingkungan yang selalu berubah.

2. TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi dan meletakkan kerangka prioritas untuk memfokuskan arah semua program dan kegiatan dalam melaksanakan Misi. Dalam rencana strategis Bappeda Kota Balikpapan, tujuan dicanangkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.

Berdasarkan Misi dan Faktor-Faktor Kunci Keberhasilan, Bappeda Kota Balikpapan menetapkan tujuan sebagai berikut :

Tabel 2.1
Misi dan Tujuan Strategis Bappeda Kota Balikpapan

Misi		Tujuan Strategis	
1.	Meningkatkan kualitas Penyusunan Perencanaan Pembangunan Kota;	1.	Meningkatkan kualitas SDM Bappeda Kota Balikpapan;
		2.	Menghasilkan dokumen perencanaan jangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek sebagai landasan pembangunan daerah Kota Balikpapan;

		3.	Menghasilkan dokumen teknis perencanaan pembangunan kota berbasis pada kebijakan-kebijakan tata ruang wilayah;
2.	Meningkatkan koordinasi, integritas, sinkronisasi dan simplifikasi perencanaan pembangunan;	4.	Meningkatkan kerjasama yang harmonis lintas SKPD guna mewujudkan koordinasi dalam perencanaan pembangunan di Kota Balikpapan;
3.	Meningkatkan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi pembangunan;	5.	Mengoptimalkan pemanfaatan Sistem Informasi perencanaan pembangunan untuk mengembangkan sistem evaluasi, dan monitoring pelaksanaan pembangunan;
4.	Meningkatkan kualitas penelitian dan pengembangan pembangunan daerah.	6.	Meningkatnya kualitas penelitian dan pengembangan pembangunan di Kota Balikpapan.

Sasaran Strategis Bappeda Kota Balikpapan merupakan penjabaran dari Misi dan Tujuan yang telah ditetapkan, yang menggambarkan sesuatu yang akan dihasilkan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun dan dialokasikan dalam 5 (lima) periode secara tahunan melalui serangkaian kegiatan yang akan dijabarkan lebih lanjut dalam suatu Rencana Kinerja (Performance Plan). Penetapan Sasaran Strategis ini diperlukan untuk memberikan fokus pada penyusunan kegiatan dan alokasi sumber daya organisasi dalam kegiatan atau operasional organisasi tiap-tiap tahun untuk kurun waktu 5 (lima) tahun.

Sasaran Strategis Bappeda Kota Balikpapan merupakan bagian integral dalam proses Perencanaan Strategis, dan merupakan dasar untuk mengendalikan dan memantau Pencapaian Kinerja. Sasaran-sasaran yang ditetapkan sepenuhnya mendukung Pencapaian Tujuan Strategis yang terkait, dengan demikian apabila seluruh Sasaran yang ditetapkan telah dicapai maka diharapkan Tujuan Strategis juga dapat dicapai.

Dalam rangka mewujudkan misi dan tujuan Bappeda Kota Balikpapan dirumuskan sasaran sebagai berikut :

1. Meningkatnya kualitas SDM perencana pembangunan;
2. Terwujudnya perencanaan pembangunan yang efektif dan efisien;
3. Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pembangunan;
4. Tersedianya struktur dan pola ruang yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan;
5. Tersedianya tata ruang pesisir dan pulau-pulau kecil;
6. Terkendalinya Pemanfaatan Ruang;
7. Terciptanya koordinasi internal antar bagian yang semakin solid sehingga mampu menunjang kinerja;
8. Berkembangnya kawasan industri dan perdagangan yang berwawasan lingkungan;
9. Terlaksananya Reformasi Birokrasi;
10. Meningkatnya capaian pelaksanaan tahapan evaluasi pembangunan;
11. Meningkatnya sarana dan prasarana fasilitas pengelola data dan informasi perencanaan pembangunan daerah;
12. Meningkatnya pemanfaatan hasil kajian-kajian dan penelitian sebagai bahan perumusan kebijakan perencanaan pembangunan di berbagai bidang.

Tabel 2.1
Tujuan, Indikator Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah
BAPPEDA KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2011-2016

NO.	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN
1.	Meningkatkan kualitas SDM Bappeda Kota Balikpapan;	1. Jumlah pegawai yang menguasai perencanaan daerah	1. Meningkatnya kualitas SDM perencana pembangunan;	Jumlah pegawai yang memiliki keahlian bidang perencanaan dan evaluasi
2.	Menghasilkan dokumen perencanaan jangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek sebagai landasan pembangunan daerah Kota Balikpapan.	1. Tersusunnya dokumen perencanaan; 2. Keterlibatan masyarakat dalam pembangunan.	1. Terwujudnya perencanaan pembangunan yang efektif dan efisien;	- Tersusunnya RPJPD - Tersusunnya RPJMD - Tersusunnya renstra SKPD - Tersusunnya RKPD - Tersusunnya KUA/PPAS

NO.	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN
			2. Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pembangunan.	- Persentase kehadiran masyarakat dalam musrenbang
3.	Menghasilkan dokumen teknis perencanaan pembangunan kota berbasis pada kebijakan-kebijakan tata ruang wilayah;	1. Terwujudnya pola ruang yang berkelanjutan; 2. Penataan ruang pesisir dan pulau-pulau kecil; 3. Pemanfaatan ruang Kota	1. Tersedianya struktur dan pola ruang yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan; 2. Tersedianya Tata ruang pesisir dan pulau-pulau kecil; 3. Terkendalinya Pemanfaatan Ruang.	- RTRW Kota Balikpapan menjadi Peraturan Daerah; - Tersosialisasinya RTRW Kota Balikpapan; - Tersedianya dokumen perencanaan tata ruang. Luas wilayah budidaya pesisir - Jumlah Fasilitas umum dan sosial - Luas Wilayah Hutan Lindung - Luas Wilayah RTH
4.	Meningkatkan kerjasama yang harmonis lintas SKPD guna mewujudkan koordinasi dalam perencanaan pembangunan di Kota Balikpapan;	1. Rapat koordinasi pembangunan; 2. Peningkatan kawasan pembangunan.	1. Terciptanya koordinasi internal antar bagian yang semakin solid sehingga mampu menunjang kinerja; 2. Berkembangnya kawasan industri dan perdagangan yang berwawasan lingkungan;	Pelaksanaan rapat koordinasi - Jumlah luasan kawasan terbuka pada lahan industri - Persentase pertumbuhan industri - Kontribusi sektor industri terhadap PDRB - Angka PDRB
5.	Mengoptimalkan pemanfaatan Sistem Informasi perencanaan pembangunan untuk mengembangkan sistem evaluasi, dan monitoring pelaksanaan pembangunan	1. Terwujudnya Reformasi birokrasi; 2. Pencapaian tahapan pembangunan; 3. Tersedianya sistem informasi pembangunan.	1. Terlaksananya Reformasi Birokrasi;	- Persentase Keselarasan Renstra SKPD dengan RPJMD - Persentase program kegiatan tahunan yang sesuai dengan renstra

NO.	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN
			2. Meningkatnya capaian pelaksanaan tahapan pembangunan;	Prosentase capaian pelaksanaan tahapan pembangunan
			3. Meningkatnya sarana dan prasarana fasilitas pengelola data dan informasi perencanaan pembangunan daerah;	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah dan jenis data statistik daerah - Sistem informasi pembangunan
6.	Mewujudkan penelitian dan pengembangan pembangunan di Kota Balikpapan;	Peningkatan kualitas penelitian dan pengembangan	Meningkatnya pemanfaatan hasil kajian-kajian dan penelitian sebagai bahan perumusan kebijakan perencanaan pembangunan di berbagai bidang.	<ul style="list-style-type: none"> - Prosentase pemanfaatan Data hasil penelitian dalam Penunjang penyusunan perencanaan pembangunan daerah - Tingkat koordinasi pelaksanaan jarlitbang

3. STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Dalam penyelenggaraan perencanaan Bappeda Kota Balikpapan, untuk mewujudkan tujuan dan sasaran dari setiap misi disusunlah strategi dan kebijakan perencanaan pembangunan yang nantinya akan dituangkan kedalam program rencana kerja. Strategi dan arah kebijakan dalam pelaksanaan Rencana Strategis Bappeda Kota Balikpapan tahun 2011-2016 dirumuskan sebagai berikut:

1. Strategi dan kebijakan meningkatkan kualitas SDM Bappeda Kota Balikpapan meliputi:

- Memanfaatkan sarana administrasi dan sarana prasarana kerja perkantoran secara efektif dan efisien dalam menunjang kinerja aparatur;
- Memberdayakan SDM melalui pendidikan teknis, formal maupun informal;
- Menerapkan sistem reward and punishment untuk meningkatkan kinerja aparatur.

2. Strategi dan kebijakan untuk Mewujudkan Perencanaan Pembangunan Daerah Jangka Pendek, Jangka Menengah dan Jangka Panjang yang berkualitas serta tanggap terhadap perubahan dan partisipatif diarahkan melalui:
 - Mengikutsertakan stakeholders pembangunan melalui berbagai forum musyawarah perencanaan pembangunan untuk menghasilkan dokumen perencanaan pembangunan yang berpihak kepada masyarakat;
 - Menyediakan sarana sosialisasi perencanaan pembangunan kota yang mudah diketahui sehingga membangkitkan semangat partisipatif masyarakat.
3. Strategi dan arah kebijakan dalam Merumuskan kebijakan teknis Perencanaan Tata Ruang Wilayah secara kontinyu, terarah dan sistematis dilakukan melalui:
 - Menyediakan aturan dan acuan yang tegas bagi masyarakat dan stakeholder dalam hal tata ruang wilayah dan infrastruktur;
 - Melakukan kajian-kajian yang mampu berdampak positif terhadap pengembangan Kota Balikpapan sebagai kota besar;
 - Melibatkan tenaga ahli dan profesional dalam penyusunan dokumen/ kajian infrastruktur wilayah yang mampu berdampak sistemik;
 - Meningkatkan sinergitas perencanaan pemanfaatan dan pengendalian ruang antar instansi dan stake holder (masyarakat).
4. Strategi dan arah kebijakan dalam meningkatkan kerjasama yang harmonis lintas SKPD guna mewujudkan koordinasi dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di Kota Balikpapan di konsentrasikan melalui:
 - Meningkatkan frekuensi pertemuan antar SKPD untuk memudahkan koordinasi perencanaan dalam bidang ekonomi, pemerintahan dan sosial budaya.
5. Strategi dan arah kebijakan yang bertujuan Mengoptimalkan pemanfaatan Sistem Informasi perencanaan pembangunan untuk mengembangkan sistem evaluasi, dan monitoring pelaksanaan pembangunan dilakukan melalui:
 - Mengembangkan pengelolaan data dan informasi dalam rangka memperoleh data yang akurat guna mengevaluasi dan memonitor pelaksanaan pembangunan;

- Meningkatkan intensitas kerjasama dengan lembaga penyedia data (BPS) sehingga dapat dihasilkan data yang tepat waktu & tepat sasaran.
6. Strategi dan arah kebijakan untuk mewujudkan penelitian dan pengembangan pembangunan di Kota Balikpapan dapat diarahkan melalui:
- Mengikutsertakan Perguruan Tinggi dan LSM serta lembaga-lembaga penelitian lain dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - Meningkatkan penerapan hasil-hasil penelitian dan pengembangan dalam perencanaan pembangunan.

4. RENCANA KINERJA TAHUNAN TAHUN 2013

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL (2011)	2012	2013
1	Meningkatkan kualitas SDM Bappeda Kota Balikpapan;	1. Meningkatnya kualitas SDM perencana pembangunan;	1. Jumlah pegawai yang memiliki keahlian bidang perencanaan dan evaluasi	Orang	40 Orang	40	40
2	Menghasilkan dokumen perencanaan jangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek sebagai landasan pembangunan daerah Kota Balikpapan.	1. Terwujudnya Perencanaan Pembangunan yang efektif dan efisien	1. Tersusunnya RPJP 2. Tersusunnya RPJMD 3. Tersusunnya Renstra SKPD 4. Tersusunnya RKPD 5. Tersusunnya KUA/PPAS	Dokumen (Perda) Dokumen (Perda) Dokumen Dokumen Dokumen	0 1 (Perda) 64 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen	0 0 64 1 2	1 0 67 1 2
		2. Meningkatnya Peran Serta Masyarakat dalam Pembangunan	1. Persentase kehadiran masyarakat dalam musrenbang	%	70	72	73
3	Menghasilkan dokumen teknis perencanaan pembangunan kota berbasis pada kebijakan-kebijakan tata ruang wilayah;	1. Tersedianya Struktur & pola ruang yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan;	1. RTRW Kota Balikpapan menjadi Peraturan Daerah 2. Tersosialisasinya RTRW Kota Balikpapan 3. Tersedianya dokumen-dokumen	Dokumen (Perda) Kecamatan RDTRK, Perda Zonasi	0 0 0	0 0 0	1 6 1

			perencanaan tata ruang				
		2. Tersedianya Tata ruang pesisir dan pulau-pulau kecil	1. Luas wilayah budidaya pesisir	Ha	749,2 Ha	10,16	10,16
		3. Terkendalinya Pemanfaatan Ruang	1. Jumlah fasilitas umum dan sosial	Bangunan	300 Bangunan	300	300
			2. Luas Wilayah Hutan Lindung	Ha	14.781 Ha	1.300 Ha	0
			3. Luas Wilayah RTH	Ha	12 Ha	3	3
4	Meningkatkan kerjasama yang harmonis lintas SKPD guna mewujudkan koordinasi dalam perencanaan pembangunan di Kota Balikpapan;	1. Terciptanya koordinasi internal antar bagian yang semakin solid sehingga mampu menunjang kinerja;	1. Pelaksanaan rapat koordinasi	kali	24 kali	36 kali	36 kali
		2. Berkembangnya kawasan industri dan perdagangan yang berwawasan lingkungan.	1. Jumlah Luasan kawasan terbuka pada lahan industri;	%	4,2 %	0,2 %	0,2 %
			2. Persentase pertumbuhan industri;	%	4,55 %	4,65%	4,75%
			3. Kontribusi sektor industri terhadap PDRB;	Trilyun	20,50 Trilyun		34,22 Trilyun
			4. Angka PDRB.	Triliun	45,17	47,11	48,45
5	Mengoptimalkan pemanfaatan Sistem Informasi perencanaan pembangunan untuk mengembangkan sistem evaluasi, dan monitoring pelaksanaan pembangunan	1. Terlaksananya Reformasi Birokrasi;	1. Persentase keselarasan Renstra SKPD dengan RPJMD	%	60%	60%	65%
			2. Persentase program kegiatan tahunan yang sesuai dengan renstra	%	65%	65%	70%
		2. Meningkatnya capaian pelaksanaan tahapan pembangunan;	1. Prosentase capaian pelaksanaan tahapan pembangunan	%	20%	40%	50%
		3. Meningkatnya sarana dan prasarana fasilitas pengelola data dan informasi perencanaan pembangunan daerah;	1. Jumlah dan jenis data statistik daerah	Kelompok data	8 Kelompok Data	8	8
			2. Sistem informasi pembangunan		Sistem	0	0

6	Mewujudkan penelitian dan pengembangan pembangunan di Kota Balikpapan;	1. Meningkatnya pemanfaatan hasil kajian-kajian dan penelitian sebagai bahan perumusan kebijakan perencanaan pembangunan di berbagai bidang.	1. Prosentase pemanfaatan Data hasil penelitian 2. Tingkat Koordinasi pelaksanaan jarlitbang	% %	50% 40%	50% 50%	55% 60%
---	--	--	---	--------	------------	------------	------------

B. INDIKATOR KINERJA UTAMA

Sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor Per/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, maka Bappeda Kota Balikpapan menetapkan indikator kinerja utama yang akan menjadi acuan ukuran kinerja dalam rangka menetapkan rencana kinerja tahunan, rencana kerja dan anggaran serta laporan akuntabilitas dan evaluasi kinerja.

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SUMBER DATA
1.	Meningkatnya kualitas SDM perencana pembangunan;	Jumlah pegawai yang memiliki keahlian bidang perencanaan dan evaluasi.	BAPPEDA
2.	Terwujudnya perencanaan pembangunan yang efektif dan efisien;	- Tersusunnya RPJP - Tersusunnya RPJMD - Tersusunnya Renstra SKPD - Tersusunnya RKPD - Tersusunnya KUA/PPAS	BAPPEDA
3.	Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pembangunan;	Persentase Kehadiran Masyarakat dalam musrenbang	BAPPEDA
4.	Tersedianya struktur & pola ruang yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan;	- RTRW Kota Balikpapan menjadi Perda - Tersosialisasinya RTRW Kota Balikpapan - Tersedianya dokumen perencanaan tata ruang	BAPPEDA

5.	Tersedianya tata ruang pesisir dan pulau-pulau kecil;	Luas wilayah budidaya pesisir	BAPPEDA
6.	Terkendalinya Pemanfaatan Ruang;	- Jumlah fasilitas umum dan sosial - Luas Wilayah Hutan Lindung - Luas Wilayah RTH	BAPPEDA
7.	Terciptanya koordinasi Internal antar bagian yang semakin solid sehingga mampu menunjang kinerja;	Pelaksanaan rapat koordinasi	BAPPEDA
8.	Berkembangnya kawasan industri dan perdagangan yang berwawasan lingkungan;	- Jumlah luasan kawasan terbuka pada lahan industri - Persentase pertumbuhan industri - Kontribusi sektor industri terhadap PDRB - Angka PDRB	BAPPEDA
9.	Terlaksananya reformasi birokrasi;	- Persentase keselarasan Renstra SKPD dengan RPJMD - Persentase program kegiatan tahunan yang sesuai dengan renstra	BAPPEDA
10.	Meningkatnya capaian pelaksanaan tahapan pembangunan;	Persentase capaian pelaksanaan tahapan pembangunan	BAPPEDA
11.	Meningkatnya sarana dan prasarana fasilitas pengelolaan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah;	- Jumlah dan jenis data statistik daerah - Sistem informasi pembangunan	BAPPEDA
12.	Meningkatnya pemanfaatan hasil kajian dan penelitian sebagai bahan perumusan kebijakan perencanaan pembangunan di berbagai bidang;	- Persentase pemanfaatan data hasil penelitian - Tingkat koordinasi pelaksanaan jarlitbang.	BAPPEDA

C. PENETAPAN KINERJA TAHUN 2013

Perencanaan kinerja merupakan proses penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis, yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Pada rencana kinerja ditetapkan target capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan beserta anggaran yang dibutuhkan. Penetapan kinerja Bappeda tahun 2013 adalah sebagai berikut :

NO	SASARAN	INDIKATOR	TARGET	PROGRAM & KEGIATAN	ANGGARAN
1	Meningkatnya kualitas SDM perencana pembangunan;	1. Jumlah pegawai yang memiliki keahlian bidang perencanaan dan evaluasi	40	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah	
				Peningkatan Kemampuan Teknis Aparat Perencana	Rp 479,725,000,00
2	Terwujudnya Perencanaan Pembangunan yang efektif dan efisien	1. Tersusunnya RPJP	1	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	
				Review Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2006-2026	Rp 52,775,000.00
		2. Tersusunnya RPJMD	0		Rp -
		3. Tersusunnya Renstra SKPD	0		Rp -
		4. Tersusunnya RKPDP	1	Pelaksanaan Forum SKPD dan Musrenbang RKPDP Kota Balikpapan TA. 2013	Rp 550,000,000.00
	5. Tersusunnya KUA/PPAS	2	Penyusunan KUA, PPAS RAPBD Kota Balikpapan TA.2013	Rp 190,000,000.00	
3	Meningkatnya Peran Serta Masyarakat dalam Pembangunan	1. Persentase kehadiran masyarakat dalam musrenbang		Program Pengembangan Data/Informasi	
				Survey indeks kepuasan masyarakat terhadap pelaksanaan pembangunan	Rp 400,000,000.00
				Penyusunan RAD-PK Kota Balikpapan	Rp 250,000,000.00
				Penyelenggaraan Musrenbang RKPDP Propinsi dan Nasional Tahun 2012	Rp 290,000,000.00
				Koordinasi Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ)	Rp 125,000,000.00
4	Tersedianya Struktur & pola ruang yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan;	1. RTRW Kota Balikpapan menjadi Peraturan Daerah	0	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	
				Persetujuan Substansi Raperda RTRW Kota Balikpapan 2011-2031 (lanjutan 2011)	Rp -
		2. Tersosialisasinya RTRW Kota Balikpapan	6	Program Perencanaan Tata Ruang	
		Sosialisasi RTRW Kota Balikpapan	Rp 598,000,000.00		
	3. Tersedianya dokumen-dokumen perencanaan tata ruang	1	Persetujuan Substansi Raperda RDTR	Rp 462,375,000.00	
5	Tersedianya Tata ruang pesisir dan pulau-pulau kecil	1. Luas wilayah budidaya pesisir	10,16	Operasional Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD)	Rp 150,000,000.00
6	Terkendalinya Pemanfaatan Ruang	1. Jumlah fasilitas umum dan sosial	300	Program Perencanaan Tata Ruang	
		2. Luas Wilayah Hutan Lindung	0	Pelayanan Informasi Tata Ruang Kota Balikpapan	Rp 150,000,000.00

		3. Luas Wilayah RTH	3	Penyusunan Sistem Informasi Penataan Ruang (SIMTARU) Kota Balikpapan	Rp	-	
7	Terciptanya koordinasi internal antar bagian yang semakin solid sehingga mampu menunjang kinerja;	1. Pelaksanaan rapat koordinasi	36 kali	Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi			
				Operasional Tim Koordinasi PNPM Mandiri Perkotaan Kota Balikpapan	Rp	250,000,000.00	
				Pengendalian Inflasi Daerah (PID)	Rp	240,448,000.00	
				Program Perencanaan Sosial dan Budaya			
				Pengendalian dan koordinasi penyelenggaraan CSR Kota Balikpapan	Rp	600,000,000.00	
				Program Pengembangan Data/Informasi			
Pengendalian dan koordinasi penanggulangan kemiskinan Kota Balikpapan	Rp	700,000,000.00					
8	Berkembangnya kawasan industri dan perdagangan yang berwawasan lingkungan.	1. Jumlah Luasan kawasan terbuka pada lahan industri;	0,2 %	Operasioanal Badan Percepatan Kawasan Industri Kariangau	Rp	400,000,000.00	
				2. Persentase pertumbuhan industri;	Studi pola pengembangan sosial ekonomi dan budaya masyarakat di kawasan pesisir Balikpapan Barat	Rp	528,670,500.00
				3. Kontribusi sektor industri terhadap PDRB;	Penyusunan buku survey sosial ekonomi daerah (SUSEDA) Kota Balikpapan	Rp	121,272,000.00
				4. Angka PDRB.	Program Perencanaan Sosial dan Budaya		
				Penyusunan buku produk domestik regional bruto (PDRB) menurut lapangan usaha dan menurut pengguna Kota Balikpapan	Rp	145,963,500.00	
9	Terlaksananya Reformasi Birokrasi;	1. Persentase keselarasan Renstra SKPD dengan RPJMD	65%	Program Pengembangan Data/Informasi			
		2. Persentase program kegiatan tahunan yang sesuai dengan renstra	70%	Pengendalian dan Evaluasi Program/Kegiatan pembangunan	Rp	750,000,000.00	
				Penyusunan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Rp	10,000,000.00	
10	Meningkatnya capaian pelaksanaan tahapan pembangunan;	1. Prosentase capaian pelaksanaan tahapan pembangunan	50%	Pengendalian dan Evaluasi Program/Kegiatan pembangunan			
				Evaluasi Program MDG's Kota Balikpapan	Rp	245,356,400.00	
11	Meningkatnya sarana dan prasarana fasilitas pengelola data dan informasi perencanaan pembangunan daerah;	1. Jumlah dan jenis data statistik daerah	8	Program Pengembangan Data/Informasi			
				Penyusunan Buku Balikpapan dalam Angka	Rp	150,000,000.00	
				Penyusunan Data Sestim Informasi Profil Daerah dan 8 kelompok data	Rp	300,000,000.00	
				Penyusunan buku neraca bahan makanan Kota Balikpapan	Rp	109,372,000.00	
				Penyusunan indeks pembangunan manusia (IPM) dan indeks kemiskinan manusia (IKM) Kota Balikpapan Tahun 2013	Rp	245,000,000.00	
				Penyusunan Makro Ekonomi Kota Balikpapan	Rp	98,939,000.00	
		2. Sistem informasi pembangunan	1	Program Pengembangan Data/Informasi			
		Penyusunan Informasi Manajemen Perencanaan Pembangunan Daerah (SIMREDA) Kota Balikpapan	Rp	346,055,600.00			
Sistem manajemen Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pembangunan Daerah Kota Balikpapan	Rp	900,000,000.00					
Program Perencanaan Pembangunan Daerah							

				Pengembangan dan Pemeliharaan Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Balikpapan	Rp	485,000,000.00		
12	Meningkatnya pemanfaatan hasil kajian-kajian dan penelitian sebagai bahan perumusan kebijakan perencanaan pembangunan di berbagai bidang.	1. Prosentas pemanfaatan Data hasil penelitian	55%	Program Perencanaan Pembangunan Daerah				
				Studi Kelayakan Monorel dan Trem Kota Balikpapan	Rp	700,000,000.00		
				Master plan Pemukiman Atas Air Kecamatan Balikpapan Barat	Rp	34,211,870.00		
				Revisi Master Plan Drainase Kota Balikpapan (Tahap II)	Rp	3,000,000,000.00		
				Revisi Master Plan Drainase Kota Balikpapan (Tahap I)	Rp	129,591,000.00		
				Evaluasi penyusunan program air minum dan penyehatan lingkungan sanitasi	Rp	397,711,000.00		
				Evaluasi Perencana Pembangunan Investasi Jangka Menengah (RPIJM) Bidang PU-Cipta Karya Kota Balikpapan	Rp	100,000,000.00		
				Pengendalian Program Hibah Sanitasi	Rp	150,000,000.00		
				Studi pengembangan jalan dan prasarana jalan di Jl. Mars. R Iswahyudi - Jend Sudirman	Rp	500,000,000.00		
				Pemetaan dan penyusunan masterplan jaringan utilitas bawah tanah Kota Balikpapan	Rp	620,000,000.00		
				Studi Kelayakan Pembangunan Taman Angrek Kota Balikpapan	Rp	87,000,000.00		
				Penyusunan KLHS RDTR	Rp	200,000,000.00		
				Program Perencanaan Sosial dan Budaya				
				Studi Kelayakan Pusat Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Terpadu	Rp	300,000,000.00		
				Kajian rencana pembangunan RS Pratama Kota Balikpapan	Rp	400,000,000.00		
				Kajian kebutuhan sekolah jenjang pendidikan dasar dan menengah di Kota Balikpapan	Rp	500,000,000.00		
				Penyusunan program jangka menengah Pronangkis	Rp	250,000,000.00		
				Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam				
				Kajian Peningkatan Kapasitas IPAL Margasari	Rp	250,000,000.00		
				2. Tingkat Koordinasi pelaksanaan jarlitbang	60%	Program Pengembangan Data/Informasi		
						Operasional sekretariat jaringan penelitian dan pengembangan	Rp	150,000,000.00

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. PENGUNGKAPAN AKUNTABILITAS KINERJA

Mengacu pada ketentuan Inpres No. 7 Tahun 1999 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Penyusunan Penetapan Kinerja dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Kinerja Bappeda Kota Balikpapan diukur berdasarkan tingkat pencapaian sasaran dan indikator sasaran serta menggambarkan tingkat capaian pada sasaran dan indikator sasaran serta menggambarkan pula tingkat capaian sasaran dan program/kegiatan dilakukan melalui perbandingan rencana kinerja dengan realisasinya.

Pencapaian sasaran dilakukan dengan cara membandingkan target dengan realisasi indikator sasaran. Kemudian hasil pengukuran kinerja tersebut dilakukan evaluasi untuk mengetahui keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis yang terkait dengan *core business* Bappeda Kota Balikpapan.

Dari 12 sasaran dan 27 indikator kinerja, pencapaian indikator kinerja Bappeda Kota Balikpapan adalah sebagai berikut :

CAPAIAN INDIKATOR SASARAN

NO	SASARAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	%
1	Meningkatnya kualitas SDM perencana pembangunan;	1. Jumlah pegawai yang memiliki keahlian bidang perencanaan dan evaluasi	40 org	42 org	105%
CAPAIAN SASARAN 1 : 105%					
<p>Capaian pada sasaran Meningkatkan kualitas SDM perencana pembangunan mencapai 105%. Hal ini dikarenakan realisasi dari pegawai yang memiliki keahlian bidang perencanaan dan evaluasi berjumlah 42 orang, bertambah dari target awal sebanyak 40 orang. Peningkatan ini disebabkan bertambahnya jumlah pegawai yang bersedia mengikuti bimbingan teknis dan pelatihan perencanaan yang dilaksanakan oleh Bappeda Kota Balikpapan.</p>					
2	Terwujudnya Perencanaan	1. Tersusunnya RPJP	1	1	100%
		2. Tersusunnya RPJMD	0	0	0

	Pembangunan yang efektif dan efisien	3. Tersusunnya Renstra SKPD	0	0	0
		4. Tersusunnya RKPD	1	2	200%
		5. Tersusunnya KUA/PPAS	2	2	100%
CAPAIAN SASARAN 2 : 133%					
<p>Capaian sasaran kedua pada tahun 2013 adalah 133%, melebihi target yang awalnya 100%. Capaian ini disebabkan oleh mulai disusunnya RKPD Perubahan yang merupakan syarat dalam perumusan Perubahan APBD setiap tahunnya. Hal ini mengakibatkan bertambahnya realisasi Dokumen RKPD tiap tahunnya menjadi 2 buah dokumen.</p>					
3	Meningkatnya Peran Serta Masyarakat dalam Pembangunan	1. Persentase kehadiran masyarakat dalam musrenbang	73 %	73 %	100%
CAPAIAN SASARAN 3 : 100%					
<p>Sasaran ketiga Bappeda Kota Balikpapan menitik beratkan pada keterlibatan masyarakat dalam merumuskan pembangunan, dalam hal ini diukur dari tingkat kehadiran masyarakat dalam musrenbang. Pada pelaksanaan Musrenbang RKPD 2014 tahun 2013 yang lalu, peserta musrenbang yang hadir mencapai 73% dari peserta yang diundang pada musrenbang. Dengan demikian maka target indikator sasaran presentase kehadiran masyarakat dalam musrenbang pada tahun 2013 sebesar 73% telah tercapai 100%.</p>					
4	Tersedianya Struktur & pola ruang yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan;	1. RTRW Kota Balikpapan menjadi Peraturan Daerah	0	0	0
		2. Tersosialisasinya RTRW Kota Balikpapan	6	6	100%
		3. Tersedianya dokumen-dokumen perencanaan tata ruang	1	0	0%
CAPAIAN SASARAN 4 : 50%					
<p>Sasaran empat terdiri dari tiga indikator sasaran yaitu RTRW Kota Balikpapan menjadi Peraturan Daerah, Tersosialisasinya RTRW Kota Balikpapan, Tersedianya</p>					

dokumen-dokumen perencanaan tata ruang. Diantara ketiga indikator tersebut hanya Sosialisasi RTRW Kota Balikpapan saja yang dapat mencapai target (100%), sedangkan indikator pertama tidak memiliki target pada tahun 2013 karena RTRW Kota Balikpapan telah disahkan menjadi Peraturan Daerah pada tahun 2012.

5	Tersedianya Tata ruang pesisir dan pulau-pulau kecil	1. Luas wilayah budidaya pesisir	10,16	10,33	101%
---	--	----------------------------------	-------	-------	------

CAPAIAN SASARAN 5 : 101 %

Capaian indikator sasaran pada sasaran ke 5 adalah 101%, hal ini ditandai dengan meningkatnya luas wilayah budidaya pesisir yang ditargetkan 759,36 Ha pada tahun 2012 menjadi 769,69 Ha pada tahun 2013 atau meningkat sebesar 10,33 Ha.

6	Terkendalinya Pemanfaatan Ruang	1. Jumlah fasilitas umum dan sosial	300	472	157%
		2. Luas Wilayah Hutan Lindung	0	0	0
		3. Luas Wilayah RTH	3	3	100%

CAPAIAN SASARAN 6 : 128%

Pada sasaran Terkendalinya Pemanfaatan Ruang, indikator sasarannya meliputi jumlah fasilitas umum dan sosial, luas wilayah hutan lindung dan luas wilayah RTH. Jumlah fasilitas umum dan sosial pada tahun 2013 ditargetkan sebesar 300 bangunan dan tercapai 472 bangunan atau 157%, sedangkan luas wilayah hutan lindung pada tahun 2013 tidak memiliki target capaian dikarenakan pada tahun 2012 telah mencapai 14.781 Ha. Luas wilayah RTH pada tahun 2013 ditargetkan bertambah 3 Ha dan terealisasi sebesar 3 Ha atau 100%. Dengan demikian secara keseluruhan capain pada sasaran enam tersebut adalah 128%.

7	Terciptanya koordinasi internal antar bagian yang semakin solid sehingga mampu menunjang kinerja;	1. Prosentase Pelaksanaan rapat koordinasi	36 kali	36 kali	100%
---	---	--	---------	---------	------

CAPAIAN SASARAN 7 : 100%

Pada sasaran ketujuh indikator yang menjadi tolak ukurnya adalah prosentase pelaksanaan rapat koordinasi. Pelaksanaan rapat koordinasi pembangunan pada tahun 2013 ditargetkan 36 kali dalam setahun. Target tersebut dapat tercapai dikarenakan pada tahun 2013 banyak terdapat kegiatan-kegiatan penting yang harus direalisasikan untuk memenuhi target RPJMD Kota Balikpapan 2011-2016.

8	Berkembangnya kawasan industri dan perdagangan yang berwawasan lingkungan.	1. Jumlah Luasan kawasan terbuka pada lahan industri;	0,2 %	0,2 %	100%
		2. Persentase pertumbuhan industri;	4,75 %	4,75 %	100 %
		3. Kontribusi sektor industri terhadap PDRB;	34,22	34,22	100%
		4. Angka PDRB.	48,45	48,45	100%

CAPAIAN SASARAN 8 : 100%

Sasaran berkembangnya kawasan industri dan perdagangan yang berwawasan lingkungan memiliki 4 indikator utama. Indikator tersebut adalah Jumlah luasan kawasan terbuka pada lahan industri, persentase pertumbuhan industri, kontribusi sektor industri terhadap PDRB dan angka PDRB. Seluruh target kinerja pada sasaran tersebut dapat tercapai secara optimal yaitu 100%.

9	Terlaksananya Reformasi Birokrasi;	1. Persentase keselarasan Renstra SKPD dengan RPJMD	65%	65%	100%
		2. Persentase program kegiatan tahunan yang sesuai dengan renstra	70%	70%	100%

CAPAIAN SASARAN 9 : 100%

Capaian kinerja sasaran kesembilan pada tahun 2013 adalah 100%. Indikator sasaran ini adalah Presentase keselarasan renstra SKPD dengan RPJMD yang ditargetkan 65% dan tercapai 65%, serta persentase program kegiatan tahunan yang sesuai dengan renstra yang ditargetkan 70% dan dapat terealisasi sebesar 70%. Pencapaian sasaran tersebut dikarenakan pada tahun 2012 telah dilakukan review Renstra SKPD dan akan dilakukan review berkala terhadap renstra tersebut sebagai bentuk penyempurnaan terhadap dokumen-dokumen perencanaan.

10	Meningkatnya capaian pelaksanaan tahapan pembangunan;	1. Prosentase capaian pelaksanaan tahapan pembangunan	50%	50%	100%
CAPAIAN SASARAN 10 : 100%					
<p>Sasaran kesepuluh adalah meningkatnya capaian pelaksanaan tahapan pembangunan. Target dari sasaran tersebut pada tahun 2013 adalah tahapan pembangunan RPJMD Kota Balikpapan mencapai 50%. Target tersebut dapat tercapai secara optimal yaitu 50%, sehingga pada tahun 2013 sasaran tahapan pembangunan Kota Balikpapan dapat terwujud sesuai target.</p>					
11	Meningkatnya sarana dan prasarana fasilitas pengelola data dan informasi perencanaan pembangunan daerah;	1. Jumlah dan jenis data statistik daerah	8	8	100%
		2. Sistem informasi pembangunan	1	1	100%
CAPAIAN SASARAN 11 : 100%					
<p>Sasaran meningkatnya sarana dan prasarana fasilitas pengelolaan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah diukur dengan indikator jumlah dan jenis data statistik daerah serta sistem informasi pembangunan. Capaian kedua indikator tersebut pada tahun 2013 adalah 100%. Hal ini ditandai dengan terdokumentasikannya Buku Balikpapan Dalam Angka dan Tersedianya Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah.</p>					
12	Meningkatnya pemanfaatan hasil kajian-kajian dan penelitian sebagai bahan perumusan kebijakan perencanaan pembangunan di berbagai bidang.	1. Prosentase pemanfaatan Data hasil penelitian	55%	55%	100%
		2. Tingkat Koordinasi pelaksanaan jarlitbang	60%	60%	100%
CAPAIAN SASARAN 12 : 100%					
<p>Capaian sasaran meningkatnya pemanfaatan hasil kajian-kajian dan penelitian pada tahun 2013 adalah 100%. Pencapaian ini tidak terlepas dari terpenuhinya target indikator kinerja sasaran yaitu prosentase pemanfaatan data hasil penelitian</p>					

dan tingkat koordinasi jarlitbang. Prosentase pemanfaatan hasil penelitian pada tahun 2013 ditargetkan sebesar 55% dan tercapai secara optimal, sehingga pencapaiannya adalah 100%. Tingkat koordinasi jarlitbang yang pada awal tahun 2013 ditargetkan sebesar 60% dapat terealisasi sebesar 60%, sehingga tingkat pencapaiannya adalah 100%.

B. PENGUNGKAPAN AKUNTABILITAS KEUANGAN

Pada tahun anggaran 2013 total belanja langsung Bappeda Kota Balikpapan adalah sebesar Rp.21.349.854.510,- dan belanja tidak langsung sebesar Rp.4.390.442.000,- , sehingga total anggaran belanja Bappeda Kota Balikpapan pada tahun 2013 adalah Rp.25.740.296.510,-. Realisasi belanja langsung tahun 2013 adalah sebesar Rp.16.373.427.498,- atau 76,69%, sedangkan realisasi belanja tidak langsung adalah sebesar Rp.3.788.030.453,- atau 86,27%. Akuntabilitas keuangan berdasarkan sasaran Bappeda Kota Balikpapan pada tahun 2013 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

NO	SASARAN	INDIKATOR	TARGET	PROGRAM & KEGIATAN	RENCANA ANGGARAN	REALISASI	%
1	Meningkatnya kualitas SDM perencana pembangunan;	1. Jumlah pegawai yang memiliki keahlian bidang perencanaan dan evaluasi	40	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah			
				Peningkatan Kemampuan Teknis Aparat Perencana	479,725,000	421,465,300	87,8
2	Terwujudnya Perencanaan Pembangunan yang efektif dan efisien	1. Tersusunnya RPJP	1	Program Perencanaan Pembangunan Daerah			
				Review Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2006-2026	52,775,000	52,700,000	99,8
		2. Tersusunnya RPJMD	0		-	-	
		3. Tersusunnya Renstra SKPD	0		-	-	
		4. Tersusunnya RKPD	1	Pelaksanaan Forum SKPD dan Musrenbang RKPD Kota Balikpapan TA. 2014	550,000,000	388,892,050	70,7
5. Tersusunnya KUA/PPAS	2	Penyusunan KUA, PPAS RAPBD Kota Balikpapan TA.2014	190,000,000	139,035,350	73,2		
3	Meningkatnya Peran Serta Masyarakat dalam Pembangunan	1. Persentase kehadiran masyarakat dalam musrenbang		Program Pengembangan Data/Informasi			
				Survey indeks kepuasan masyarakat terhadap pelaksanaan pembangunan	400,000,000	353,209,585	88,3
				Penyusunan RAD-PK Kota Balikpapan	250,000,000	115,484,000	46,1
				Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Propinsi dan Nasional Tahun 2012	290,000,000	142,907,700	49,2

				Koordinasi Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ)	125,000,000	93,723,140	74,9
4	Tersedianya Struktur & pola ruang yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan;	1. RTRW Kota Balikpapan menjadi Peraturan Daerah	0	Program Perencanaan Pembangunan Daerah			
				Persetujuan Substansi Raperda RTRW Kota Balikpapan 2011-2031 (lanjutan 2011)	-	-	
		2. Tersosialisasinya RTRW Kota Balikpapan	6	Program Perencanaan Tata Ruang			
				Sosialisasi RTRW Kota Balikpapan	598,000,000	341,383,045	57,1
		3. Tersedianya dokumen-dokumen perencanaan tata ruang	1	Persetujuan Substansi Raperda RDTR	462,375,000	115,807,250	25,1
5	Tersedianya Tata ruang pesisir dan pulau-pulau kecil	1. Luas wilayah budidaya pesisir	10,16	Operasional Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD)	150,000,000	89,965,895	59,9
6	Terkendalinya Pemanfaatan Ruang	1. Jumlah fasilitas umum dan sosial	300	Program Perencanaan Tata Ruang			
		2. Luas Wilayah Hutan Lindung	0	Pelayanan Informasi Tata Ruang Kota Balikpapan	150,000,000	118,979,690	79,3
		3. Luas Wilayah RTH	3				2
7	Terciptanya koordinasi internal antar bagian yang semakin solid sehingga mampu menunjang kinerja;	1. Prosentase Pelaksanaan rapat koordinasi	80%	Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi			
				Operasional Tim Koordinasi PNPM Mandiri Perkotaan Kota Balikpapan	250,000,000	160,095,315	64,0
				Pengendalian Inflasi Daerah (PID)	240,448,000	191,102,950	79,4
				Program Perencanaan Sosial dan Budaya			
				Pengendalian dan koordinasi penyelenggaraan CSR Kota Balikpapan	600,000,000	494,190,990	82,4
				Program Pengembangan Data/Informasi			
		Pengendalian dan koordinasi penanggulangan kemiskinan Kota Balikpapan	700,000,000	476,280,670	68,0		
8	Berkembangnya kawasan industri dan perdagangan yang berwawasan lingkungan.	1. Jumlah Luasan kawasan terbuka pada lahan industri;	0,2 %	Operasional Badan Percepatan Kawasan Industri Kariangau	400,000,000	176,372,350	44,1
		2. Persentase pertumbuhan industri;		Studi pola pengembangan sosial ekonomi dan budaya masyarakat di kawasan pesisir Balikpapan Barat	528,670,500	447,789,000	84,7
		3. Kontribusi sektor industri terhadap PDRB;		Penyusunan buku survey sosial ekonomi daerah (SUSEDA) Kota Balikpapan	121,272,000	68,220,750	56,3
		4. Angka PDRB.		Program Perencanaan Sosial dan Budaya			
				Penyusunan buku produk domestik regional bruto (PDRB) menurut lapangan usaha dan menurut pengguna Kota Balikpapan	145,963,50	90,664,050	62,1
9	Terlaksananya Reformasi Birokrasi;	1. Persentase keselarasan Renstra SKPD dengan RPJMD	65%	Program Pengembangan Data/Informasi			
		2. Persentase program kegiatan tahunan yang sesuai dengan renstra	70%	Pengendalian dan Evaluasi Program/Kegiatan pembangunan	750,000,000	331,381,950	44,2
				Penyusunan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	10,000,000	3,890,340	38,9
10	Meningkatnya capaian	1. Prosentase capaian	50%	Pengendalian dan Evaluasi Program/Kegiatan pembangunan			

	pelaksanaan tahapan pembangunan;	pelaksanaan tahapan pembangunan		Evaluasi Program MDG's Kota Balikpapan	245,356,400	103,096,750	42,0
11	Meningkatnya sarana dan prasarana fasilitas pengelola data dan informasi perencanaan pembangunan daerah;	1. Jumlah dan jenis data statistik daerah	8	Program Pengembangan Data/Informasi			
				Pervusunan Buku Balikpapan dalam Angka	150,000,000	85,430,000	56,9
				Penyusunan Sistem Informasi Profil Daerah dan 8 kelompok data	300,000,000	155,718,300	51,9
				Penyusunan buku neraca bahan makanan Kota Balikpapan	109,372,000	63,403,500	57,9
				Penyusunan indeks pembangunan manusia (IPM) dan indeks kemiskinan manusia (IKM) Kota Balikpapan Tahun 2013	245,000,000	165,360,125	67,5
				Penyusunan Makro Ekonomi Kota Balikpapan	98,939,000	70,313,200	71,1
		2. Sistem informasi pembangunan	1	Program Pengembangan Data/Informasi			
				Penyusunan Informasi Manajemen Perencanaan Pembangunan Daerah (SIMREDA) Kota Balikpapan	346,055,600	247,949,700	71,6
				Sistem manajemen Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pembangunan Daerah Kota Balikpapan	900,000,000	884,254,780	98,3
				Program Perencanaan Pembangunan Daerah			
				Pengembangan dan Pemeliharaan Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Balikpapan	485,000,000	396,136,850	81,6
12	Meningkatnya pemanfaatan hasil kajian-kajian dan penelitian sebagai bahan perumusan kebijakan perencanaan pembangunan di berbagai bidang.	1. Prosentas pemanfaatan Data hasil penelitian	55%	Program Perencanaan Pembangunan Daerah			
				Studi Kelayakan Monorel dan Trem Kota Balikpapan	700,000,000	669,765,730	95,6
				Master plan Pemukiman Atas Air Kecamatan Balikpapan Barat	34,211,870	34,211,870	100
				Revisi Master Plan Drainase Kota Balikpapan (Tahap II)	3,000,000,000	2,499,721,840	83,3
				Revisi Master Plan Drainase Kota Balikpapan (Tahap I)	129,591,000	129,591,000	100
				Evaluasi penyusunan program air minum dan penyehatan lingkungan sanitasi	397,711,000	335,527,115	84,4
				Evaluasi Perencana Pembangunan Investasi Jangka Menengah (RPIJM) Bidang PU-Cipta Karya Kota Balikpapan	100,000,000	67,864,835	67,9
				Pengendalian Program Hibah Sanitasi	150,000,000	95,489,250	63,6
				Studi pengembangan jalan dan prasarana jalan di Jl. Mars. R Iswahyudi - Jend Sudirman	500,000,000	476,148,725	95,2
				Pemetaan dan penyusunan masterplan jaringan utilitas bawah tanah Kota Balikpapan	620,000,000	568.405,825	91,7
				Studi Kelayakan Pembangunan Taman Anggrek Kota Balikpapan	87,000,000	74,731,620	85,9
				Penyusunan KLHS RDTR	200,000,000	64,168,635	32,1
				Program Perencanaan Sosial dan Budaya			
				Studi Kelayakan Pusat Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Terpadu	300,000,000	228,050,875	76,0
				Kajian rencana pembangunan RS Pratama Kota Balikpapan	400,000,000	273,468,720	68,4
				Kajian kebutuhan sekolah jenjang pendidikan dasar dan menengah di Kota Balikpapan	500,000,000	370,566,250	74,1

			Penyusunan program jangka menengah Prongkis	250,000,000	182,214,615	72,8
			Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam			
			Kajian Peningkatan Kapasitas IPAL Margasari	250,000,000	218,045,250	87,2
	2. Tingkat Koordinasi pelaksanaan jarlitbang	60%	Program Pengembangan Data/Informasi			
			Operasional sekretariat jaringan penelitian dan pengembangan	150,000,000	105,565,995	70,4

Capaian Keuangan Sasaran 1 :

Kegiatan pada sasaran strategis Meningkatnya kualitas SDM perencana pembangunan adalah Peningkatan kapasitas teknis aparatur perencana. Pada tahun 2013 rencana anggaran kegiatan tersebut adalah Rp. 479.725.000,- sedangkan realisasi keuangan dari kegiatan tersebut adalah 87,86% atau Rp.421.465.300,-.

Capaian Keuangan Sasaran 2 :

Kegiatan pada sasaran strategis Terwujudnya perencanaan pembangunan yang efektif dan efisien meliputi kegiatan Review RPJPD Kota Balikpapan 2006-2026, Pelaksanaan Forum SKPD dan Musrenbang RKPD Tahun 2013 serta Penyusunan KUA/PPAS RAPBD 2014 dan P-APBD TA. 2013 Kota Balikpapan. Realisasi anggaran dari kegiatan-kegiatan tersebut adalah sebesar Rp.580,627,400,- atau 73,24% dari target anggaran sebesar Rp.792,775,000,-. Capaian realisasi tersebut dikarenakan adanya verifikasi honor panitia pada setiap kegiatan pada sasaran tersebut.

Capaian Keuangan Sasaran 3 :

Kegiatan pada sasaran strategis keempat antara lain Survey indeks kepuasan masyarakat terhadap pelaksanaan pembangunan, Penyusunan RAD-PK Kota Balikpapan dan Koordinasi Penyusunan LKPJ. Alokasi anggaran pada sasaran tersebut adalah Rp. 1,065,000,000,- dan terealisasi sebesar Rp.705,324,425,- atau 66,23%. Rendahnya serapan anggaran pada sasaran tersebut dikarenakan adanya penghematan lelang dan perjalanan dinas.

Capaian Keuangan Sasaran 4 :

Sasaran strategis Tersedianya struktur dan pola ruang yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan didukung melalui kegiatan Sosialisasi RTRW Kota Balikpapan dan persetujuan substansi Raperda RDTR Kota Balikpapan. Target anggaran sasaran tersebut adalah sebesar Rp.1,060,375,000,- dan terealisasi sebesar Rp. 457,190,295,- atau 43,12%. Rendahnya realisasi anggaran pada sasaran tersebut dikarenakan adanya penghematan belanja pada kegiatan Sosialisasi RTRW dan belum disetujuinya substansi Raperda RDTR Kota Balikpapan, sehingga kegiatan tersebut direalokasikan pada tahun anggaran berikutnya.

Capaian Keuangan Sasaran 5 :

Kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran Tersedianya Tata Ruang Pesisir dan Pulau-pulau kecil adalah Operasional Badan Koordinasi Pentaraan Ruang Daerah Kota Balikpapan. Anggaran pada kegiatan tersebut sebesar Rp. 150,000,000,- dan realisasinya sebesar Rp. 89,965,895,- atau 59,9%. Rendahnya realisasi kegiatan tersebut dikarenakan adanya penghematan belanja dan verifikasi honor tim BKPRD Kota Balikpapan.

Capaian Keuangan Sasaran 6 :

Capaian sasaran Terkendalinya Pemanfaatan Ruang didukung oleh kegiatan Pelayanan Informasi Tata Ruang Kota Balikpapan dengan anggaran sebesar Rp. 150,000,000,- dan terealisasi sebesar Rp.118,979,690 atau 79,3%.

Capaian Keuangan Sasaran 7 :

Sasaran strategis terciptanya koordinasi internal antar bagian yang semakin solid, dicapai melalui beberapa kegiatan yaitu Operasional Tim Koordinasi PNPM Mandiri Perkotaan Kota Balikpapan, Pengendalian Inflasi Daerah, Pengendalian dan koordinasi penyelenggaraan CSR Kota Balikpapan, serta pengendalian dan koordinasi penanggulangan kemiskinan Kota Balikpapan. Total anggaran dari kegiatan tersebut adalah Rp.1,790,448,000,-. Realisasi dari total anggaran tersebut adalah Rp.1,321,669,925,- atau 73,8%.

Capaian Keuangan Sasaran 8 :

Pada tahun anggaran 2013, sasaran strategis Berkembangnya kawasan industri dan perdagangan yang berwawasan lingkungan dicapai melalui beberapa kegiatan yaitu Operasional Badan Percepatan Kawasan Industri Kariangau, studi pola pengembangan sosial ekonomi dan budaya masyarakat di kawasan pesisir Balikpapan Barat, Penyusunan buku SUSEDA Kota Balikpapan dan penyusunan buku PDRB menurut lapangan usaha dan menurut pengguna Kota Balikpapan. Target anggaran untuk sasaran tersebut adalah Rp. 1,049,942,500,- dengan realisasi sebesar Rp. 783,046,150,- atau 74,6 %.

Capaian Sasaran 9 :

Kegiatan pada sasaran strategis tersebut antara lain Pengendalian dan Evaluasi Program/kegiatan pembangunan dan Penyusunan AKIP dengan total alokasi anggaran Rp. 760,000,000,-. Realisasi pada tahun 2013 sebesar Rp.335,272,290 atau 44,1 %. Rendahnya realisasi keuangan sasaran tersebut dikarenakan honor untuk panitia kegiatan tidak direalisasikan akan tetapi kegiatan tersebut tetap terlaksana dengan baik. Disamping itu pula terdapat kegiatan Pengendalian dan Evaluasi Program/kegiatan pembangunan yang tidak terealisasi secara optimal.

Capaian Sasaran 10 :

Pada sasaran tersebut terdapat dua kegiatan yang menunjang pencapaiannya yaitu Pengendalian, Evaluasi, Pelaporan dan Publikasi Program/Kegiatan dan Evaluasi Program MDG's Kota Balikpapan. Realisasi anggaran kegiatan evaluasi MDG's Kota Balikpapan adalah Rp. 103.096.750,- atau 42,02% dari pagu anggaran 2013 sebesar Rp.245.356.400,-. Rendahnya realisasi keuangan dikarenakan tidak terlaksananya workshop untuk menunjang kegiatan tersebut, akan tetapi laporan kegiatan yang merupakan output dari evaluasi program tersebut tetap terlaksana.

Capaian Sasaran 11 :

Sasaran kesebelas yaitu meningkatnya sarana dan prasarana fasilitas pengelolaan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah terdiri atas

dua indikator sasaran yaitu jumlah dan jenis data statistik daerah dan sistem informasi pembangunan. Total anggaran pada sasaran tersebut adalah Rp.2.634.366.600,- dan terealisasi sebesar Rp. 2.068.566.455,- atau 78,5%. Kegiatan-kegiatan yang menunjang pencapaian sasaran tersebut adalah Penyusunan Buku Balikpapan dalam Angka, Penyusunan Sistem Informasi Profil Daerah dan 8 kelompok data, Penyusunan buku neraca bahan makanan Kota Balikpapan, Penyusunan indeks pembangunan manusia (IPM) dan indeks kemiskinan manusia (IKM) Kota Balikpapan Tahun 2013, Penyusunan Makro Ekonomi Kota Balikpapan, Penyusunan Informasi Manajemen Perencanaan Pembangunan Daerah (SIMREDA) Kota Balikpapan, Sistem manajemen Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pembangunan Daerah Kota Balikpapan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Balikpapan. Seluruh kegiatan pada sasaran tersebut dapat terlaksana dengan baik dan mencapai target yang telah ditentukan.

Capaian Sasaran 12 :

Sasaran Meningkatnya pemanfaatan hasil kajian-kajian dan penelitian sebagai bahan perumusan kebijakan perencanaan pembangunan di berbagai bidang terdiri atas tujuh belas kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp.7.768.513.870,-. Realisasi keuangan dari sasaran tersebut adalah Rp.5.825.132.325,- atau 75%. Secara keseluruhan kegiatan pada sasaran tersebut telah terlaksana dan mencapai target, akan tetapi kegiatan Penyusunan KLHS RDTR tidak dapat terealisasi secara optimal dikarenakan belum disetujuinya substansi RDTR Kota Balikpapan.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Pada tahun 2013, Bappeda Kota Balikpapan telah melaksanakan seluruh program dan kegiatan yang ditetapkan. Sehubungan dengan tersebut, sebagai wujud pelaksanaan pertanggungjawaban kinerja serta keuangan disusunlah Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Bappeda Kota Balikpapan Tahun 2013. Tujuan dari penyusunan dokumen tersebut adalah untuk mengetahui sejauh mana kualitas dan capaian kinerja Bappeda Kota Balikpapan sehingga akan memudahkan dalam proses pengendalian dan evaluasi instansi pemerintah.

Secara kumulatif, capaian kinerja Bappeda Kota Balikpapan pada tahun 2013 adalah 101,42% , sedangkan capaian akuntabilitas keuangan adalah sebesar 76,69%. Apabila dilihat dari keseluruhan presentase capaian kinerja, maka kinerja Bappeda Kota Balikpapan dapat dikategorikan tercapai dengan baik dan berkualitas.

Pelaksanaan program dan kegiatan Bappeda Kota Balikpapan pada tahun 2013 secara keseluruhan telah dilaksanakan secara efektif dan efisien. Pencapaian target kinerja lebih dititik beratkan pada indikator sasaran yang merupakan penjabaran dari RPJMD Kota Balikpapan dengan tidak mengesampingkan target kinerja indikator lainnya. Kegiatan-kegiatan yang telah ditetapkan dan tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran dikelola dengan seefisien mungkin sehingga terdapat beberapa penghematan dalam pengeluaran belanja SKPD. Efisiensi anggaran yang dilaksanakan selama tahun anggaran 2013 antara lain adalah efisiensi biaya perjalanan dinas dan efisiensi honorarium kegiatan pegawai. Efisiensi biaya perjalanan dinas dilakukan dengan cara menyeleksi keperluan-keperluan perjalanan dinas yang diarahkan kepada kegiatan-kegiatan dengan sifat lebih prioritas dan penting. Sedangkan efisiensi honorarium kegiatan pegawai dilakukan dengan cara memverifikasi ulang besaran honor yang akan diberikan sesuai asas kepatutan dan kelayakan.

Diantara program dan kegiatan tersebut terdapat satu sasaran yang belum dapat dicapai secara maksimal yaitu Tersedianya Struktur & pola ruang yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan. Hal ini dikarenakan target salah satu indikator pada sasaran tersebut tidak dapat tercapai yaitu Tersedianya dokumen-dokumen perencanaan tata ruang. Dokumen perencanaan tata ruang yang dimaksud adalah Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kota Balikpapan, RDTR Kota Balikpapan belum dapat ditetapkan karena materi substansi RDTR Kota Balikpapan cukup mendetail dan rumit sehingga dibutuhkan kajian lebih mendalam dan waktu yang tidak sedikit pula.

B. SARAN

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka terdapat beberapa permasalahan yang harus segera diselesaikan untuk lebih meningkatkan kualitas kinerja Bappeda Kota Balikpapan, antara lain :

1. Diperlukan komitmen bersama seluruh pegawai Bappeda Kota Balikpapan untuk meningkatkan kualitas kinerja masing-masing, sehingga pencapaian tujuan dan sasaran strategis organisasi dapat dilakukan secara efektif dan efisien serta berhasilguna;
2. Memberikan bimbingan dan pelatihan secara komprehensif sehingga seluruh aparatur Bappeda Kota Balikpapan memiliki kompetensi yang lebih di masing-masing bidang.

Demikian saran yang dapat diperhatikan dan dipertimbangkan untuk peningkatan kualitas kinerja Bappeda Balikpapan kedepannya.

KEPALA BAPPEDA KOTA BALIKPAPAN



SURYANTO

Pembina Utama Muda

NIP. 19601101 198501 1 003

PENGUKURAN KINERJA BAPPEDA KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2013

NO	SASARAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	%
1	Meningkatnya kualitas SDM perencana pembangunan;	1. Jumlah pegawai yang memiliki keahlian bidang perencanaan dan evaluasi	40 org	42 org	105%
2	Terwujudnya Perencanaan Pembangunan yang efektif dan efisien	1. Tersusunnya RPJP	1	1	100%
		2. Tersusunnya RPJMD	0	0	0
		3. Tersusunnya Renstra SKPD	0	0	0
		4. Tersusunnya RKPD	1	2	200%
		5. Tersusunnya KUA/PPAS	2	2	100%
3	Meningkatnya Peran Serta Masyarakat dalam Pembangunan	1. Persentase kehadiran masyarakat dalam musrenbang	73 %	73 %	100%
4	Tersedianya Struktur & pola ruang yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan;	1. RTRW Kota Balikpapan menjadi Peraturan Daerah	0	0	0
		2. Tersosialisasinya RTRW Kota Balikpapan	6	6	100%
		3. Tersedianya dokumen-dokumen perencanaan tata ruang	1	0	0%
5	Tersedianya Tata ruang pesisir dan pulau-pulau kecil	1. Luas wilayah budidaya pesisir	10,16	10,33	101%
6	Terkendalinya Pemanfaatan Ruang	1. Jumlah fasilitas umum dan sosial	300	472	157%
		2. Luas Wilayah Hutan Lindung	0	0	0
		3. Luas Wilayah RTH	3	3	100%
7	Terciptanya koordinasi internal antar bagian yang semakin solid sehingga mampu menunjang kinerja;	1. Prosentase Pelaksanaan rapat koordinasi	36 kali	36 kali	100%
8	Berkembangnya kawasan industri dan perdagangan yang berwawasan lingkungan.	1. Jumlah Luasan kawasan terbuka pada lahan industri;	0,2 %	0,2 %	100%
		2. Persentase pertumbuhan industri;	4,75 %	4,75 %	100 %

		3. Kontribusi sektor industri terhadap PDRB;	34,22	34,22	100%
		4. Angka PDRB.	48,45	48,45	100%
9	Terlaksananya Reformasi Birokrasi;	1. Persentase keselarasan Renstra SKPD dengan RPJMD	65%	65%	100%
		2. Persentase program kegiatan tahunan yang sesuai dengan renstra	70%	70%	100%
10	Meningkatnya capaian pelaksanaan tahapan pembangunan;	1. Prosentase capaian pelaksanaan tahapan pembangunan	50%	50%	100%
11	Meningkatnya sarana dan prasarana fasilitas pengelola data dan informasi perencanaan pembangunan daerah;	1. Jumlah dan jenis data statistik daerah	8	8	100%
		2. Sistem informasi pembangunan	1	1	100%
12	Meningkatnya pemanfaatan hasil kajian-kajian dan penelitian sebagai bahan perumusan kebijakan perencanaan pembangunan di berbagai bidang.	1. Prosentase pemanfaatan Data hasil penelitian	55%	55%	100%
		2. Tingkat Koordinasi pelaksanaan jarlitbang	60%	60%	100%



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2013 KEPALA BAPPEDA KOTA BALIKPAPAN

Dalam rangka mewujudkan tata pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil (*good governance*), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **SURYANTO**

Jabatan : **KEPALA BAPPEDA KOTA BALIKPAPAN**

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : **H.M. RIZAL EFFENDI**

Jabatan : **WALIKOTA BALIKPAPAN**

Selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji :

1. mewujudkan target kinerja tahun 2013 sebagaimana yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan dan dokumen pelaksanaan anggaran;
2. mewujudkan Balikpapan sebagai kawasan Zona Integritas melalui :
 - a. Komitmen SKPD yang bersih dan bebas KKN;
 - b. Peningkatan kualitas pelayanan publik;
 - c. Melaksanakan pembinaan dan peningkatan disiplin aparatur serta tertib administrasi pada SKPD.
3. menyampaikan laporan pelaksanaan target kinerja sebagaimana point 1 dan 2 per 3 bulan kepada Walikota.

Indikator capaian sebagaimana dimaksud pada point 1 dan 2 di atas adalah terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari lembar perjanjian ini.

Kebhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama dan pihak pertama bersedia menerima sanksi atas kegagalan dalam pencapaian kinerja.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Balikpapan, 14 Januari 2013

Pihak Kedua,



H.M. RIZAL EFFENDI

Pihak Pertama,

SURYANTO



PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
DAERAH

JL. JEND. SUDIRMAN RT.13 No.1 Telp. (0542) 422515
BALIKPAPAN

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KOTA BALIKPAPAN

NOMOR : 188.4.46/17/BPD-SKT

TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA RENCANA STRATEGIS
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN
TAHUN 2011-2016

KEPALA BAPPEDA KOTA BALIKPAPAN,

- Menimbang : a. bahwa demi terarahnya pencapaian visi dan misi Walikota Balikpapan Tahun 2011-2016 yang termuat dalam RPJMD Kota Balikpapan tahun 2011-2016 maka diperlukan tolak ukur yang jelas dan sistematis untuk mengukur kinerja pembangunan pada setiap tahun perencanaannya;
- b. bahwa dalam rangka penguatan terhadap RPJMD Kota Balikpapan tahun 2011-2016 maka diperlukan penetapan sasaran strategis sebagai acuan dalam Indikator Kinerja Utama Bappeda Kota Balikpapan 2011-2016;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, maka perlu

menetapkan dalam Peraturan Walikota Balikpapan tentang Indikator Kinerja Utama Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Balikpapan Tahun 2011-2016.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 1959, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008

- tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 7. Undang-undang Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Urusan Pemerintahan Antara Pemerintahan, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4014);
 9. Peraturan Pemerintahan Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
13. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kota Balikpapan (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 2 Seri E Nomor 02 tanggal 8 Oktober 2008).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **INDIKATOR KINERJA UTAMA RENCANA STRATEGIS BAPPEDA KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2011-2016.**

Pasal 1

- (1) Indikator Kinerja Utama Rencana Strategis Bappeda Kota Balikpapan Tahun 2011-2016 adalah dokumen

perencanaan Bappeda Kota Balikpapan yang berisi sasaran strategis dan indikator kinerja utama untuk kurun waktu 2011-2016 yang merupakan penjabaran dari target kinerja Rencana Strategis Bappeda Kota Balikpapan Tahun 2011-2016.

(2) Indikator Kinerja Utama Rencana Strategis Bappeda Kota Balikpapan Tahun 2011-2016 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SUMBER DATA
1.	Meningkatnya kualitas SDM perencana pembangunan;	Jumlah pegawai yang memiliki keahlian bidang perencanaan dan evaluasi.	BAPPEDA
2.	Terwujudnya perencanaan pembangunan yang efektif dan efisien;	<ul style="list-style-type: none"> - Tersusunnya RPJP - Tersusunnya RPJMD - Tersusunnya Renstra SKPD - Tersusunnya RKPD - Tersusunnya KUA/PPAS 	BAPPEDA
3.	Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pembangunan;	Persentase Kehadiran Masyarakat dalam musrenbang	BAPPEDA
4.	Tersedianya struktur & pola ruang yang berwawasan	<ul style="list-style-type: none"> - RTRW Kota Balikpapan menjadi Perda - Tersosialisinya RTRW Kota Balikpapan 	BAPPEDA

	lingkungan dan berkelanjutan;	- Tersedianya dokumen perencanaan tata ruang	
5.	Tersedianya tata ruang pesisir dan pulau-pulau kecil;	- Luas wilayah budidaya pesisir	BAPPEDA
6.	Terkendalinya Pemanfaatan Ruang;	- Jumlah fasilitas umum dan sosial - Luas Wilayah Hutan Lindung - Luas Wilayah RTH	BAPPEDA
7.	Terciptanya koordinasi Internal antar bagian yang semakin solid sehingga mampu menunjang kinerja;	Pelaksanaan rapat koordinasi	BAPPEDA
8.	Berkembangnya kawasan industri dan perdagangan yang berwawasan lingkungan;	- Jumlah luasan kawasan terbuka pada lahan industri - Persentase pertumbuhan industri - Kontribusi sektor industri terhadap PDRB - Angka PDRB	BAPPEDA
9.	Terlaksananya	- Persentase keselarasan	BAPPEDA

	reformasi birokrasi;	Renstra SKPD dengan RPJMD - Persentase program kegiatan tahunan yang sesuai dengan renstra	
10.	Meningkatnya capaian pelaksanaan tahapan pembangunan;	Persentase capaian pelaksanaan tahapan pembangunan	BAPPEDA
11.	Meningkatnya sarana dan prasarana fasilitas pengelolaan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah;	- Jumlah dan jenis data statistik daerah - Sistem informasi pembangunan	BAPPEDA
12.	Meningkatnya pemanfaatan hasil kajian dan penelitian sebagai bahan perumusan kebijakan perencanaan pembangunan di berbagai bidang;	- Persentase pemanfaatan data hasil penelitian - Tingkat koordinasi pelaksanaan jarlitbang.	BAPPEDA

Pasal 2

Bappeda Kota Balikpapan dalam merencanakan program, kegiatan dan indikator kinerjanya wajib mengacu pada Indikator Kinerja Utama Rencana Strategis Bappeda Kota Balikpapan Tahun 2011-2016 yang diatur dalam Keputusan ini.

Pasal 3

Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Balikpapan

Pada tanggal : 2 Januari 2014

KEPALA BAPPEDA KOTA BALIKPAPAN



SURYANTO

Pembina Utama Muda

19601101 198501 1 003

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Walikota Balikpapan (Sebagai Laporan);
2. Sekretaris Daerah Kota Balikpapan;
3. Inspektur Inspektorat Kota Balikpapan.